



Transformasi Pengabdian Masyarakat menjadi Strategi Pertahanan dalam Menjaga Stabilitas Pangan Nasional

Community Service as a Defense Strategy: A Transformation for National Food Stability

Josefine Lika Kartika^{1*}, Aris Sarjito², Edy Saptono²

^{1,2,3} Manajemen Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia ,
Indonesia

**Penulis Korespondensi: josefinelkb99@gmail.com*

Article History:

Naskah Masuk: 17 September 2025;
Revisi: 18 Oktober 2025;
Diterima: 24 November 2025;
Tersedia: 26 November 2025.

Keywords: Community Empowerment; Community Service; Food Security; Food Stability; National Defense.

Abstract. *Food security is a key pillar of national stability and defense, yet various community service programs focusing on food often operate partially and are not strategically integrated. This research aims to analyze the potential and transformation model for community service programs to become an effective part of the national food defense strategy. Using a qualitative literature review method, this study collects and synthesizes data from various academic sources, reports, and policy documents. The findings indicate that transforming the role of community service from a charitable approach to a systematic empowerment movement can shift communities from passive objects to active subjects in maintaining food stability. This transformation is realized through the optimization of local resources, such as home gardens, and the adoption of adaptive agricultural technologies. However, its implementation is challenged by weak synergy between the government's top-down approach, the suboptimal role of academia, and community initiatives whose potential has not been fully realized. By implication, this study asserts the need for a collaborative governance model that integrates community-based initiatives into the national policy cycle, allowing public participation to be optimally empowered as the frontline of Indonesia's food defense system.*

Abstrak

Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama stabilitas dan pertahanan nasional, namun berbagai program pengabdian masyarakat yang berfokus pada pangan sering kali berjalan parsial dan belum terintegrasi secara strategis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan model transformasi program pengabdian masyarakat agar dapat menjadi bagian dari strategi pertahanan pangan nasional yang efektif. Dengan menggunakan metode studi literatur kualitatif, penelitian ini mengumpulkan dan mensintesis data dari berbagai sumber akademis, laporan, dan dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi peran pengabdian masyarakat dari pendekatan karitatif menjadi gerakan pemberdayaan sistematis dapat mengubah masyarakat dari objek pasif menjadi subjek aktif dalam menjaga stabilitas pangan. Transformasi ini diwujudkan melalui optimalisasi sumber daya lokal seperti lahan pekarangan dan adopsi teknologi pertanian adaptif. Meskipun demikian, implementasinya dihadapkan pada tantangan berupa lemahnya kolaborasi antara pendekatan pemerintah yang bersifat *top-down*, peran akademisi yang belum optimal, dan inisiatif komunitas yang potensinya belum tergarap maksimal. Secara implikatif, studi ini menegaskan perlunya sebuah model tata kelola kolaboratif yang mengintegrasikan inisiatif komunitas ke dalam siklus kebijakan nasional, sehingga partisipasi masyarakat dapat diberdayakan secara optimal sebagai garda terdepan dalam sistem pertahanan pangan Indonesia.

Kata kunci: Ketahanan Pangan; Pemberdayaan Masyarakat; Pengabdian Masyarakat; Pertahanan Nasional; Stabilitas Pangan

1. LATAR BELAKANG

Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama stabilitas nasional. Ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan yang memadai bagi seluruh penduduk adalah fondasi bagi pembangunan bangsa (Arif et al., 2020). Ancaman krisis pangan, baik yang disebabkan oleh perubahan iklim, bencana alam, maupun gejolak ekonomi, dapat secara langsung mengganggu

keamanan dan pertahanan negara. Di tingkat masyarakat, kemandirian dalam memenuhi kebutuhan dasar pangan menjadi cerminan kesejahteraan sosial ekonomi yang mendukung stabilitas dari level akar rumput (Farida et al., 2023). Oleh karena itu, memastikan ketahanan pangan bukan hanya agenda ekonomi, tetapi juga bagian integral dari strategi pertahanan nasional yang komprehensif.

Meskipun demikian, berbagai program pengabdian masyarakat yang berfokus pada ketahanan pangan sering kali masih berjalan secara parsial dan belum sepenuhnya terintegrasi sebagai komponen strategi pertahanan nasional. Inisiatif seperti program ketahanan pangan melalui penanaman sayur dengan media *polybag* di Desa Alassapi, misalnya, bertujuan utama untuk menciptakan kemandirian sosial ekonomi masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada penjual keliling (Farida et al., 2023).

Walaupun program semacam ini berhasil memberdayakan masyarakat sebagai subjek yang mandiri, kerangka kerjanya belum secara eksplisit dihubungkan dengan agenda pertahanan negara yang lebih luas. Di tingkat nasional, kebijakan lebih terfokus pada program makro seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan program perlindungan sosial, tanpa hubungan yang jelas dengan gerakan-gerakan komunal berbasis pengabdian masyarakat (Arif et al., 2020).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, muncul pertanyaan penelitian utama: *Bagaimana transformasi pengabdian masyarakat dapat diarahkan menjadi strategi pertahanan dalam menjaga stabilitas pangan nasional?* Untuk menjawab pertanyaan ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan model transformasi program pengabdian masyarakat agar dapat menjadi bagian dari strategi pertahanan pangan nasional yang efektif.

Secara akademis dan praktis, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan. Secara konseptual, penelitian ini akan merumuskan kerangka kerja yang mengintegrasikan inisiatif pemberdayaan masyarakat ke dalam strategi pertahanan negara. Secara praktis, hasilnya dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam merancang program pengabdian masyarakat yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan lokal tetapi juga secara strategis memperkuat stabilitas pangan nasional. Dengan demikian, partisipasi aktif masyarakat dapat diberdayakan secara optimal sebagai garda terdepan dalam sistem pertahanan pangan Indonesia (Farida et al., 2023).

2. KAJIAN TEORITIS

Ketahanan Pangan dalam Perspektif Pertahanan Nasional

Ketahanan pangan didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana semua orang, pada setiap saat, memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan diet dan preferensi pangan demi kehidupan yang aktif dan sehat (Adam & Afrizal, 2025). Secara konseptual, ketahanan pangan ditopang oleh empat pilar utama, yaitu ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas (Nirzawan et al., 2025). Dalam konteks kebijakan di Indonesia, strategi ketahanan pangan diarahkan tidak hanya untuk mencapai ketersediaan dan keterjangkauan, tetapi juga kemandirian, kedaulatan, kualitas, dan keamanan pangan (Miyasto, 2014).

Sebagai isu strategis, ketahanan pangan memiliki dampak fundamental tidak hanya pada sektor pertanian, tetapi juga pada stabilitas ekonomi, sosial, dan politik suatu negara (Nirzawan et al., 2025). Ketersediaan dan keterjangkauan pangan menjadi indikator kunci bagi stabilitas nasional, di mana pengalaman krisis di Indonesia pada tahun 1965 dan 1998 menunjukkan bahwa pemicu utamanya adalah kenaikan harga pangan yang tidak terjangkau oleh masyarakat (Miyasto, 2014). Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah yang pada akhirnya dapat mengancam stabilitas politik. Dengan demikian, ketahanan pangan adalah komponen vital dari keamanan nasional.

Perkembangan dinamika global juga telah menggeser pola keamanan dari yang semula berfokus pada kekuatan militer menjadi lebih luas mencakup ancaman non-militer, salah satunya adalah masalah pangan (Sarjito, 2022). Ancaman terhadap ketahanan pangan kini semakin beragam, mencakup krisis iklim, ketidakstabilan geopolitik, gangguan rantai pasok, perang, serangan siber, hingga peperangan ekonomi yang disponsori negara lain (Nirzawan et al., 2025). Kerawanan akses terhadap pangan yang terjangkau dapat melemahkan sistem pertahanan nasional karena berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, yang merupakan komponen pertahanan sipil dalam pembangunan bangsa (Adam & Afrizal, 2025).

Dalam konteks pertahanan negara, sistem pertahanan Indonesia yang bersifat semesta melibatkan seluruh sumber daya nasional, termasuk pangan, sebagai bagian dari upaya melindungi kedaulatan dan keutuhan wilayah (Sarjito, 2022). Pemerintah memandang pengamanan pangan sebagai upaya penting untuk melindungi eksistensi negara (Adam & Afrizal, 2025). Oleh karena itu, kebijakan untuk mencapai swasembada pangan, mengembangkan lumbung pangan (*food estate*), dan memastikan cadangan pangan strategis menjadi bagian integral dari strategi pertahanan (Nirzawan et al., 2025).

Keterlibatan berbagai institusi negara, termasuk Kementerian Pertahanan dan militer, dalam program ketahanan pangan menggarisbawahi pandangan bahwa stabilitas pangan setara dengan kekuatan pertahanan (Sarjito, 2022). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Pertahanan No. 3/2002 yang mencakup perlindungan terhadap warga negara dan sumber daya alam sebagai bagian dari sistem pertahanan nasional (Adam & Afrizal, 2025). Dengan demikian, upaya menjaga ketahanan pangan tidak hanya merupakan agenda ekonomi, tetapi juga sebuah strategi pertahanan proaktif untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan negara secara menyeluruh.

Teori Pertahanan Semesta dan Peran Masyarakat

Sistem pertahanan negara Indonesia menganut doktrin Sistem Pertahanan Semesta (sishanta), yang sebelumnya dikenal sebagai Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (sishankamrata) (Danga et al., 2023) . Sistem ini melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya dalam upaya mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman (Nitit & Saksono, 2023).

Dasar hukum sishanta tercantum dalam UUD 1945. Pasal 27 ayat (3) menegaskan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara, sedangkan Pasal 30 ayat (2) menyatakan pertahanan dan keamanan dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta, dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai komponen utama dan rakyat sebagai pendukung (Nitit & Saksono, 2023). Sistem ini bercirikan kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan, sesuai kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Dalam Sishanta, kekuatan pertahanan negara terdiri dari tiga komponen (Ernes et al., 2022):

1. Komponen Utama, yaitu TNI dan Polri sebagai pelaksana utama pertahanan.
2. Komponen Cadangan, terdiri dari warga negara yang telah secara sukarela mengikuti pelatihan militer untuk dimobilisasi pada masa darurat.
3. Komponen Pendukung, mencakup masyarakat dan sumber daya nasional yang mendukung pertahanan melalui logistik, fasilitas, dan keahlian (sumber daya non-militer).

Keikutsertaan warga negara dalam bela negara diwujudkan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar militer, pengabdian sebagai prajurit TNI, dan pengabdian sesuai profesi. Peran masyarakat tidak hanya mencakup perlawanan bersenjata, tetapi juga non-bersenjata(Ernes et al., 2022). Dalam menghadapi ancaman non-militer, seperti ancaman ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya, pemberdayaan masyarakat, khususnya di

wilayah perbatasan, menjadi strategi pertahanan penting (Setiawati, 2016). Masyarakat yang sejahtera dan mandiri memiliki daya tangkal efektif terhadap potensi ancaman, sehingga pembangunan berbasis kesejahteraan dapat dipandang sebagai bagian integral dari strategi pertahanan semesta. Oleh karena itu, pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat dapat dipandang sebagai bagian integral dari strategi pertahanan semesta.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur kualitatif. Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis data secara sistematis dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan pemerintah. Proses analisis berfokus pada identifikasi konsep, argumen, dan model teoretis yang berkaitan dengan ketahanan pangan, strategi pertahanan negara, sistem pertahanan semesta, dan program pengabdian masyarakat. Dengan menelaah dan menginterpretasi berbagai sudut pandang dari literatur yang ada, penelitian ini bertujuan untuk membangun kerangka kerja konseptual yang komprehensif guna menjawab pertanyaan penelitian utama mengenai bagaimana transformasi pengabdian masyarakat dapat diarahkan menjadi strategi pertahanan dalam menjaga stabilitas pangan nasional.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Peran Pengabdian Masyarakat dalam Mendukung Pertahanan Pangan

Peran pengabdian masyarakat dalam konteks ketahanan pangan nasional telah mengalami transformasi signifikan. Dari yang semula bersifat karitatif atau berupa penyuluhan satu arah, kini pengabdian masyarakat telah berevolusi menjadi sebuah strategi pertahanan yang sistematis dan memberdayakan. Transformasi ini mengubah posisi masyarakat dari objek pasif menjadi subjek aktif yang mampu membangun kemandirian dan resiliensi pangan mulai dari skala terkecil, yaitu rumah tangga (Jumiati et al., 2022). Proses ini berfokus pada pemberdayaan sebagai rangkaian pengembangan kompetensi individu dan kelompok untuk membuat pilihan rasional dalam menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan mereka secara mandiri (Jumiati et al., 2022).

Salah satu pilar utama dalam transformasi ini adalah optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan. Di tengah penyusutan lahan pertanian produktif akibat alih fungsi menjadi kawasan industri dan pemukiman, lahan pekarangan muncul sebagai potensi besar yang belum tergarap maksimal (Yusuf, 2018). Kegiatan ini mendorong masyarakat untuk tidak

membatasi kekarangan mereka kosong, melainkan mengubahnya menjadi sumber pangan keluarga dengan menanam komoditas seperti cabai, bawang, jahe, serta aneka sayuran lainnya di kekarangan (*homesteading*). Pemanfaatan lahan kekarangan secara berkelanjutan terbukti mampu menunjang kebutuhan pangan sehari-hari, menyediakan sumber karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral, sekaligus berpotensi menambah pendapatan ekonomi rumah tangga (Yusuf, 2018).

Seiring dengan tantangan keterbatasan lahan, khususnya di area padat penduduk, pengabdian tersebut juga dapat bertransformasi dengan mengintegrasikan teknologi pertanian inovatif dan adaptif. Teknologi ini memungkinkan budidaya tanaman dapat dilakukan di mana saja, selama terdapat cahaya dan sirkulasi udara yang cukup (Yusuf, 2018). Beberapa teknologi yang disosialisasikan antara lain:

1. Hidroponik: Sistem budidaya tanaman tanpa media tanah, melainkan menggunakan larutan air bernutrisi. Metode ini memungkinkan keluarga menghasilkan sayuran berkualitas bahkan di lahan yang sangat terbatas (Mutmainah et al., 2023).
2. Vertikultur: Teknik budidaya secara vertikal atau bertingkat, sangat cocok diterapkan untuk memaksimalkan ruang. Contoh praktis yang diajarkan adalah menanam bawang merah menggunakan wadah seperti tempat sampah berlubang atau botol bekas yang disusun ke atas (Jumiati et al., 2022).
3. Akuaponik dan Budikdamber: Memadukan budidaya ikan lele dan tanaman kangkung dalam satu wadah; efisien lahan dan ramah lingkungan karena limbah ikan menjadi nutrisi tanaman (Mutmainah et al., 2023).

Selain itu, pengabdian kepada masyarakat juga berperan strategis dalam mendorong diversifikasi sumber pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat yang seimbang. Di tengah kondisi di mana tingkat konsumsi protein hewani nasional sering kali melebihi kemampuan produksi dalam negeri, program pengabdian kepada masyarakat hadir sebagai solusi di tingkat akar rumput (Widianingrum & Septio, 2023). Melalui kegiatan seperti Budikdamber, masyarakat didorong untuk mampu memproduksi sumber protein hewani sendiri. Dengan demikian, pengabdian masyarakat telah bertransformasi menjadi sebuah gerakan pemberdayaan yang mengintegrasikan optimalisasi sumber daya lokal, inovasi teknologi, penguatan kelembagaan, dan diversifikasi pangan. Pendekatan holistik ini menjadikan kegiatan ini sebagai strategi pertahanan yang efektif dalam menjaga stabilitas pangan nasional.

Analisis Hubungan antara Pemerintah, Akademisi, dan Komunitas dalam Strategi Pangan Nasional

Stabilitas pangan nasional tidak dapat terwujud melalui upaya sepihak, melainkan membutuhkan kolaborasi kuat antara tiga pilar utama: pemerintah, akademisi, dan komunitas. Hubungan kolaboratif di antara ketiga aktor ini menjadi fondasi bagi perumusan dan implementasi strategi ketahanan pangan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Namun, analisis berdasarkan studi yang ada menunjukkan bahwa hubungan ini sering kali berjalan secara parsial dan dihadapkan pada berbagai tantangan struktural.

Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, secara historis memegang peran sebagai aktor dominan dalam merumuskan kebijakan ketahanan pangan (Simatupang, 2007). Kebijakan ini sering kali didasarkan pada pola pikir ketersediaan pangan, yang berfokus pada target produksi dan swasembada nasional (Simatupang, 2007). Program-program berskala besar seperti *Food Estate* merupakan manifestasi dari pendekatan ini. Namun, meskipun bertujuan baik, pendekatan yang sentralistik dan bersifat *top-down* ini justru sering kali menghadapi berbagai kendala.

Pertama, yaitu terjadi fragmentasi kelembagaan dan lemahnya sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah (Rusdinor & Baiturrahim, 2025). Hal ini menyebabkan program tidak relevan dengan kebutuhan lokal dan implementasinya tidak optimal. Kedua, kapasitas birokrasi di tingkat daerah sering kali belum memadai untuk mengadaptasi regulasi pusat ke dalam konteks lokal yang kompleks, yang diperparah oleh lemahnya sistem *monitoring* dan evaluasi (Ivone, 2025). Akibatnya, kebijakan menjadi tidak responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan di tingkat akar rumput.

Di sisi lain, komunitas, terutama masyarakat adat dan kelompok tani lokal, memiliki peran strategis yang potensinya belum tergarap secara maksimal. Mereka adalah pemilik pengetahuan lokal yang teruji dalam pengelolaan sumber daya, adaptasi musim, dan konservasi ekosistem yang menopang sistem pangan subsisten (Ivone, 2025). Inisiatif seperti lumbung pangan komunitas dan program pangan mandiri di tingkat kampung menunjukkan adanya model ketahanan pangan berbasis kearifan lokal yang efektif dan tangguh (Ivone, 2025).

Namun, peran dan pengetahuan ini sering kali terpinggirkan. Pendekatan pemerintah yang terlalu teknokratis cenderung mengabaikan sistem pangan berbasis adat, bahkan memicu resistensi sosial dan konflik agraria (Ivone, 2025). Lebih jauh, kebijakan yang bersifat *top-down* dan koersif di masa lalu telah menyebabkan marginalisasi hingga hilangnya kelembagaan dan kearifan lokal seperti lumbung desa (Simatupang, 2007). Belum adanya mekanisme formal

yang menjembatani dialog antara pemerintah dan komunitas secara berkelanjutan menjadi salah satu penghambat utama integrasi ini.

Oleh sebab itu, Akademisi memegang peranan krusial sebagai jembatan penghubung antara kerangka kebijakan pemerintah dan realitas di tingkat komunitas. Peran ini dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk. Pertama, akademisi berfungsi sebagai analis kritis yang mengevaluasi paradigma kebijakan yang ada dan menawarkan kerangka kerja baru yang lebih relevan (Simatupang, 2007). Misalnya, pergeseran dari cara pandang dari ketersediaan ke perolehan pangan yang lebih komprehensif didorong oleh kajian-kajian akademis. Kedua, akademisi dapat berkontribusi dalam perencanaan berbasis dengan menyediakan data dan analisis yang akurat (Ivone, 2025). Keterlibatan mereka dalam proses penyusunan strategi, monitoring, dan evaluasi dapat membantu mengatasi kelemahan kapasitas birokrasi dan memastikan program lebih tepat sasaran. Ketiga, akademisi dapat bertindak sebagai fasilitator dalam forum koordinasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, swasta, dan komunitas, sehingga tercipta keselarasan yang lebih baik (Rusdinor & Baiturrahim, 2025).

Secara keseluruhan, hubungan antara pemerintah, akademisi, dan komunitas dalam strategi pangan nasional saat ini masih belum kohesif. Dominasi pendekatan *top-down* oleh pemerintah menyebabkan suara dan kearifan komunitas kurang terakomodasi, sementara peran analitis akademisi belum dioptimalkan dalam siklus kebijakan. Untuk mewujudkan stabilitas pangan yang tangguh, diperlukan transformasi menuju model tata kelola kolaboratif. Pembentukan forum koordinasi multi-aktor yang terlembaga menjadi sebuah kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan visi, mengintegrasikan pengetahuan, dan memastikan bahwa strategi ketahanan pangan benar-benar berakar pada kebutuhan dan potensi lokal.

Tantangan dan Peluang Implementasi Strategi Pertahanan Berbasis Pengabdian Masyarakat

Transformasi program pengabdian kepada masyarakat menjadi strategi pertahanan untuk menjaga stabilitas pangan nasional dihadapkan pada serangkaian tantangan yang kompleks sekaligus peluang yang signifikan. Implementasi inisiatif seperti budidaya hidroponik dan *homesteading* kontemporer memerlukan pendekatan adaptif untuk mengatasi berbagai kendala yang ada di lapangan (Fatarina P et al., 2025). Tantangan utama dalam penerapan strategi ini bersifat multidimensional, mencakup aspek teknis, sumber daya, regulasi, dan sosial. Salah satu hambatan mendasar adalah kurangnya pemahaman teknis di kalangan masyarakat mengenai metode pertanian modern tersebut (Herizon et al., 2025).

Banyak warga, terutama di wilayah urban, belum memiliki pengalaman dalam aktivitas pertanian sehingga memerlukan pendampingan intensif (Ummami et al., 2025). Implementasi

program juga sering kali terhambat oleh keterbatasan sumber daya, baik dari segi modal, lahan, maupun waktu (Herizon et al., 2025). Biaya awal untuk membangun instalasi hidroponik atau memulai *homesteading* bisa menjadi beban bagi sebagian keluarga, sementara ketersediaan lahan menjadi isu krusial di kawasan perkotaan akibat pesatnya laju urbanisasi (Fatarina P et al., 2025).

Selain itu, kendala akses terhadap bibit unggul dan pupuk organik juga menjadi masalah yang sering dihadapi di tingkat komunitas (Fatarina P et al., 2025). Dari sisi kebijakan, aturan zonasi dan regulasi dari asosiasi perumahan sering kali tidak mendukung praktik pertanian di lingkungan non-tradisional (Herizon et al., 2025). Kurangnya dukungan kebijakan yang terstruktur dapat menghambat legalitas dan skalabilitas inisiatif pengabdian kepada masyarakat berbasis ketahanan pangan. Pada tingkat sosial, dapat muncul resistensi yang dipicu oleh kekhawatiran terhadap estetika lingkungan atau budaya terhadap metode baru, ditambah tantangan signifikan berupa rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian yang saat ini didominasi oleh pelaku berusia lanjut (Ummami et al., 2025).

Di tengah berbagai tantangan tersebut, terdapat peluang besar untuk mengoptimalkan program pengabdian kepada masyarakat sebagai strategi pertahanan pangan. Saat ini terjadi peningkatan kesadaran masyarakat global dan lokal akan pentingnya ketahanan pangan, kemandirian, dan gaya hidup berkelanjutan (Herizon et al., 2025). Tren pencarian daring terkait *homesteading* dan *urban farming* yang meningkat menunjukkan adanya kebutuhan informasi dan praktik langsung di tengah masyarakat, sehingga membuka peluang strategis bagi pengembangan program edukatif yang relevan (Herizon et al., 2025).

Teknologi seperti hidroponik juga menawarkan solusi efektif untuk mengatasi keterbatasan lahan di wilayah urban dan semi-urban (Fatarina P et al., 2025). Pendekatan pertanian modern yang bersih, efisien, dan tidak memerlukan tanah terbukti mampu menarik minat generasi muda yang sebelumnya kurang tertarik pada pertanian konvensional (Ummami et al., 2025). Lebih lanjut, program pengabdian kepada masyarakat berbasis ketahanan pangan terbukti mampu memperkuat solidaritas dan jaringan sosial di dalam komunitas (Herizon et al., 2025).

Inisiatif seperti kebun komunitas dan forum tukar keterampilan dapat mendorong kolaborasi antarwarga dan membangun kemandirian kolektif. Selain memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga, program ini juga membuka peluang pendapatan mikro dari penjualan hasil panen berlebih atau produk olahan, yang dapat berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi desa (Fatarina P et al., 2025). Terakhir, terdapat peluang besar untuk menjalin kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan sektor swasta (Fatarina et al., 2025).

Sebagaimana dibahas pada sub-bab sebelumnya, kolaborasi ini dapat menjembatani kesenjangan antara kebijakan *top-down* dan kebutuhan riil di komunitas, serta memperluas dampak sosial melalui penyediaan fasilitas, pelatihan, dan akses teknologi untuk mendukung ketahanan pangan dan ekonomi lokal (Ummami et al., 2025).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Transformasi pengabdian masyarakat menjadi strategi pertahanan dalam menjaga stabilitas pangan nasional dapat terwujud melalui pergeseran paradigma dari pendekatan karitatif menjadi gerakan pemberdayaan yang sistematis. Penelitian ini menunjukkan bahwa inisiatif berbasis komunitas, seperti optimalisasi lahan pekarangan dan adopsi teknologi pertanian adaptif, mampu mengubah posisi masyarakat dari objek pasif menjadi subjek aktif dalam ekosistem ketahanan pangan. Meskipun demikian, implementasinya menghadapi tantangan multidimensional, mulai dari keterbatasan pemahaman teknis dan sumber daya di tingkat masyarakat, hingga belum adanya dukungan kebijakan yang mumpuni dari pemerintah. Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada kolaborasi antara tiga pilar utama: pemerintah sebagai regulator, akademisi sebagai fasilitator inovasi, dan komunitas sebagai garda terdepan implementasi. Tanpa adanya model tata kelola yang integratif, inisiatif di tingkat akar rumput akan tetap berjalan parsial dan gagal terhubung dengan agenda pertahanan negara yang lebih luas.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan beberapa langkah strategis untuk mengoptimalkan peran pengabdian masyarakat. Pertama, pemerintah disarankan untuk merumuskan kebijakan yang secara eksplisit mengintegrasikan program ketahanan pangan berbasis komunitas ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai bagian dari komponen pendukung sistem pertahanan semesta. Kebijakan ini harus disertai dengan regulasi yang fasilitatif, seperti penyederhanaan aturan zonasi untuk pertanian urban dan alokasi insentif bagi rumah tangga yang aktif menerapkan praktik kemandirian pangan. Kedua, akademisi dan perguruan tinggi perlu memperkuat perannya sebagai jembatan pengetahuan dengan mengembangkan modul pendampingan yang mudah diakses oleh masyarakat serta melakukan riset berkelanjutan untuk menghasilkan teknologi pertanian yang murah dan efisien. Terakhir, perlu dibentuk sebuah forum koordinasi multi-aktor yang terlembaga di tingkat daerah untuk menyelaraskan program pemerintah, hasil riset akademisi, dan aspirasi komunitas, sehingga setiap inisiatif dapat berjalan secara terpadu untuk memperkuat stabilitas pangan nasional secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Adam, B., & Afrizal, T. Y. (2025). Strengthening of state company on strategic commodities in Indonesia for food security interest under WTO rules. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, 3(1), 929–945. <https://doi.org/10.70193/cendekia.v3i1.174>
- Arif, S., Isdijoso, W., Fatah, A. R., & Tamayis, A. R. (2020). *Tinjauan strategis ketahanan pangan dan gizi di Indonesia: Informasi terkini 2019–2020*. https://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/rr_fsn_indonesia_finalreport_id.pdf
- Danga, C. M., Yusuf, M. A., & Prakoso, L. Y. (2023). *Strategi pertahanan pada penggunaan kekuatan pertahanan nirmiliter*. CV Widina Media Utama. <https://repository.penerbitwidina.com/pt/publications/563608/>
- Ernes, Prakoso, L. Y., & Risman, H. (2022). Strategi perang semesta melalui optimalisasi nilai Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(3). <https://bajangjournal.com/index.php/JPM/article/view/1760>
- Farida, I., Ningsih, L., Aini, N., Kasiari, N., Nurdiana, P., Maharany, S., & A'yun, Q. (2023). Menciptakan masyarakat mandiri secara sosial ekonomi melalui program ketahanan pangan di Desa Alassapi. *ENGAGEMENT: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 47–54. <https://doi.org/10.58355/engagement.v2i1.19>
- Fatarina, E. P., Da Silva, T. M. F. B., SL, R. A., & Trianingsih, R. (2025). Memperkuat ketahanan pangan melalui budidaya hidroponik dan tanaman obat keluarga (TOGA). *Jurnal Nusantara Berbakti*, 3(1), 94–100. <https://doi.org/10.59024/jnb.v3i1.547>
- Herizon, M., Ardiansyah, D., Putra, R. I., Reflis, R., & Utama, S. P. (2025). Homesteading kontemporer sebagai strategi pengabdian kepada masyarakat berbasis keberlanjutan. *ABDISOSHUM: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial dan Humaniora*, 4(2), 197–206. <https://doi.org/10.55123/abdisoshum.v4i2.5203>
- Ivone, A. N. (2025). Strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan: Sinergi kebijakan dan administrasi publik di Merauke. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 1573–1591. <https://doi.org/10.63822/9y5pyw47>
- Jumiati, I. E., Tamimi, K., Buiney, M. M., Mawarni, M. I., & Dewi, Y. (2022). Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan untuk mendukung ketahanan pangan melintasi pandemi Covid-19 di Desa Kolelet, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang. *Intervensi Komunitas*, 3(2), 97–105. <https://doi.org/10.32546/ik.v3i2.1541>
- Miyasto, M. (2014). Strategi ketahanan pangan nasional guna meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi dalam rangka ketahanan nasional. *Jurnal Lemhannas RI*, 2(1), 17–34. <https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/151>
- Mutmainah, N. F., Saharuddin, E., Utsany, R., & Warastri, A. (2023). Peran pemberdayaan masyarakat dalam penguatan ketahanan keluarga. *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(4), 538–551. <https://doi.org/10.37478/abdiqa.v3i4.3501>
- Nirzawan, F. D., Yudha, G., & Wakhid, A. A. (2025). A new era of President Prabowo's leadership and governance: Indonesia's food security. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 25(1), 185–218. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v25i1.26589>
- Nitit, Y. W., & Saksono, M. S. (2023). Prinsip dan dinamika sistem pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keikutsertaan rakyat. *Jurnal Mahatvavirya*, 10(1), 1–14. <https://ojs.akmil.ac.id/index.php/mahatvavirya/article/view/62>

- Rusdinor, & Baiturrahim, M. (2025). Manajemen pengelolaan sumber daya manusia dalam ketahanan pangan. *Manuntung: Jurnal Ilmu Sains dan Teknologi*, 1(1), 24–31. <https://batuahjurnal.my.id/index.php/mjst/article/view/25>
- Sarjito, A. (2022). The role of the Ministry of Defense in ensuring food security for state defense. *Journal of Governance*, 7(3). <https://doi.org/10.31506/jog.v7i3.14607>
- Setiawati, P. (2016). Pemberdayaan sebagai strategi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. *Sisi Lain Realita*, 1(2), 13–22. <https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2016.1380>
- Simatupang, P. (2007). Analisis kritis terhadap paradigma dan kerangka dasar kebijakan ketahanan pangan nasional. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 25(1), 1–18. <https://doi.org/10.21082/fae.v25n1.2007.1-18>
- Ummami, D., Saragih, H. S. M., & Farhan, A. K. (2025). Budidaya hidroponik sebagai strategi ketahanan pangan dan regenerasi petani muda melalui pemberdayaan masyarakat. *MARTABE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.31604/jpm.v8i8.%25p>
- Widianingrum, D. C., & Septio, R. W. (2023). Peran peternakan dalam mendukung ketahanan pangan Indonesia: Kondisi, potensi, dan peluang pengembangan. *National Multidisciplinary Sciences*, 2(3), 285–291. <https://doi.org/10.32528/nms.v2i3.298>
- Yusuf, A. (2018). Optimalisasi lahan pekarangan untuk mendukung ketahanan pangan dan ekonomi keluarga. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2), 104–107. <https://jurnal.unpad.ac.id/pkm/article/view/16554>